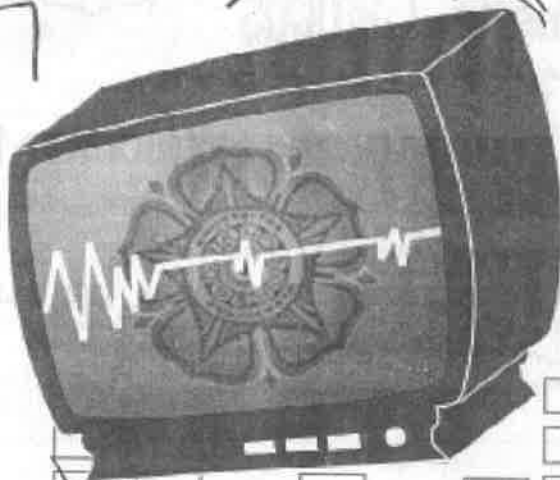


INDIKATOR

[beyondthefact]

no. 7 / IX
September 2002



Denyut Akhir
Idealisme

Pendidikan

M. Supraja, SH, S.Sos :
“...pragmatisme di dunia pendidikan
tidak dapat kita hindari”.



FRIENDS HOUSE COMP-SELL

Rental computer	Jual beli Computer & HP
Install program	Software
Service	Hardware
Upgrade	Maintenance

PRINT DAN RENTAL HARGA PALING BERSAING !!

Karang Malang Blok A 45 Telp.(0274)515582 Yogyakarta



MaCell

Welcome to Campus

The barometer...!!!

Pelayanannya Ok...

Kualitas Terbaik...

Koleksinya Lengkap....

Garansinya Pasti....

Harganya ...

Wow.. Bersaing.....!!!

....dari dosen MaCell dikenal JAGONYA.....

Welcome to MaCell

TOEKAR TAMBAH & JUAL BELI HANDPHONE

Ikuti Info Harga Handphone Terlengkap MaCell Setiap Hari Senin dan Jum'at di KR

Pusat :

Jl. Jend.Sudirman 36 0274-522252

Cab :

Jogja Phone Market Jl. Jend. Sudirman

Jl. Gejayan Mrican (Utara Sanata Dharma)

Tugu Phone Centre Jl. Mangkubumi

0274-551993

0274-523570

08122954666

tidak hanya browsing dan chatting... :p

karena kami adalah RUMAH KEDUA dalam kehidupan DIGITAL anda

KAMI MENYEDIAKAN:

- ① MEMBUAT MUSIK DIGITAL, WORKSHOP MERAKIT PC, PEMROGRAMAN, DLL
- ① PELATIHAN PENGENALAN KOMPUTER DAN INTERNET UNTUK PEMULA
- ① PEMBUATAN ALBUM FOTO DIGITAL DALAM FORMAT VCD
- ① TRANSFER DATA KE DALAM BENTUK CD
- ① PEMBUATAN CD AUDIO
- ① AKSES INTERNET DAN GAME NETWORK
- ① CAFÉ

kunjungi kami segera...

*dan temukan RUMAH KEDUA anda
di sini...*

artdico

ART & DIGITAL COMMUNITY

Jl. Soeroto No. 7 Kotabaru Yogyakarta Telp/Fax: (0274)561913 e-mail: artdico@yahoo.com



Dari Tapal Kuda

Selamat Datang,

Kawan!

Merupakan tradisi **SINTESA** dalam setiap penyambutan anggota keluarga baru dengan menghadirkan **INDIKATOR** yang kini kawan-kawan genggam. Semacam *prelude* bagi kawan-kawan Maba untuk mulai mengenal Sospol dan **SINTESA**.

INDIKATOR kali ini banyak menyorot beragam percik-percik menyangkut realitas terdekat kita, kampus, sebagai ujud pembacaan kami atas berbagai dinamikanya.

Bingkisan manis yang telah melalui proses kerja demikian berwarnanya, penuh pembelajaran bagi segenap awak **SINTESA** yang terlibat di dalamnya. Banyak cerita yang tercecer dari proses pengerjaan **INDIKATOR** mungil ini, mulai dari proses reportase yang makin menyadarkan kami atas makna kerja tim, proses *editing* yang cukup panjang, yang memaksa redaksi untuk mengundur proses *lay out* dan mengharuskan beberapa awak bermalam di kampus, hingga proses cetak yang cukup bikin kami *deg-degan* karena *mepetnya* jarak antara *finishing* dengan hari-H. Namun, itu semua justru makin merekatkan ikatan di antara kami dan membuat kami semakin mencintai **SINTESA**, ruang berproses kami semua (dan kawan-kawan nantinya).

Harapan kami, semoga ini dapat menjadi *stimulus* awal bagi kawan-kawan Maba untuk mentradisikan kepekaan dan kekritisian dalam membaca dan memahami realitas sekitar kita. Akhirnya, Selamat membaca! Selamat berdialektika!

Come join us and Carpe diem!

REDAKSI



Sebagian awak **SINTESA** di MUBES Kaliurang

LPPM **SINTESA** FISIPOL UGM

Pemimpin Umum : Haning Nurvitra |

Sekretaris Umum : Aprillia Ika | **Pemimpin**

Redaksi : Ruisatul Khoiriyah | **Pemimpin**

Perusahaan : Retno Agustin | **Kepala Litbang**

: Tia Setiadi

Kerabat Kerja *INDIKATOR* : Laila K, Bambang

PJ, Gali Subhan, Nanang B, Ani MM, Diah Rahmi,

Titin H, Melany Eva, Hasta B, Reza Rahman,

Apollinarius, Edy Kurniawan, Mas'ad, Dian P, Nova

Bayo, Umi Hani, Hasrul Hanif, Pascalis P.W, Nino

S | **Lay-Out**: Setiawan HS, Hendi P

Alamat: FISIPOL UGM, Jl Socio Yusticia 1, Bulaksumur, Yogyakarta

E-mail : Sintesapress@Hotmail.com

Website : www.sintesa.cjb.net

DAFTAR ISI

DARI TAPAL KUDA (h.3)

GERBANG (h.4)

Otonomi Kampus, kilas historis dan kronologis

LIPUTAN UTAMA

Gonjang-ganjing perihal BOP (h.6)

Geliat UGM benahi mutu (h.9)

JMPT a la Sospol, seberapa siapkah? (h.11)

WAWANCARA UTAMA

"...pragmatisme di dunia pendidikan tidak dapat kita hindari". (h.12)

WACANA

Tentang Pendidikan : Sebuah Catatan Awal untuk Kawan Mahasiswa Baru (h.15)

KAMPUSIANA

Mahasiswa Aktivist! (Anak Sospol : Bukan Sekadar Anak Kuliah) (h.18)

FITUR

Aku di Sospol (h.21)

ARTIKEL LEPAS

Tubuh dan Kuasa dalam Gelak Kapitalisme Mutakhir (h.23)

Otonomi Kampus

kilas historis dan kronologis

Id e otonomi kampus sebetulnya telah mencuat sekitar awal 1990-an. Kala itu, negara kian kukuh mengungkung pelbagai institusi, termasuk institusi pendidikan. Penetrasi negara ke dalam dunia pendidikan, diantaranya melalui penataran P4, mata kuliah Pancasila dan Kewiraan serta represifitas negara terhadap kritisisme mahasiswa. Politik korporatisme yang digulirkan negara berimbas pada tersumbatnya hak berorganisasi mahasiswa sehingga mahasiswa harus melewati birokrasi yang berlaku jika ingin menggelar mimbar bebas yang skalanya cukup eskalatif, preferensi (pilihan) tema pun diseleksi amat ketat dengan merujuk 'kitab suci' Pancasila.

Tak urung, protes pun menyeruak, beberapa elemen gerakan mahasiswa menggelar aksi menuntut diberlakukannya otonomi kampus. Di UGM contohnya muncul "Komite Tegak Lima" yang menolak keputusan pemerintah dalam pemilihan rektor karena dianggap tidak demokratis. Selain kalangan mahasiswa, beberapa intelektual kampus pun turut menuntut pemberlakuan otkam. Tapi pemaknaan mengenai otonomi kampus tersebut, dikalangan pihak-pihak yang menuntut sendiri ternyata tak seragam. Sebagian akademisi lebih menekankan otkam sebagai pelucutan intervensi negara yang menyebabkan 'impoten'-nya pengembangan keilmuan dan penelitian untuk menjawab tantangan pasar, problem-problem sosial, dan problem pembangunan secara umum.

Sementara itu, kalangan mahasiswa lebih mengkritisi rajutan politik korporatisme yang dijalkan lewat jala-jala kebijakan depolitisasi, deideologisasi dan normalisasi yang dianggap telah mencekik dan membonsai kreativitas mahasiswa. Dengan demikian, Otonomi Kampus yang dituntut mahasiswa kala itu adalah otonom -bebas dari intervensi

negara- dalam aktivitas di kampus, termasuk di dalamnya melakukan kritisisme terhadap pola tingkah negara. Tetapi alih-alih ditanggapi secara positif, riak protes penuntutan otonomi malah dianggap negara sebagai laku subversif, sehingga isu otonomi kampus tersebut perlahan memudar dan lantas menguap hilang.

Bergulirnya reformasi serentak membawa perubahan fundamental yang dalam ranah pendidikan ditandai bergaungnya kembali isu otonomi kampus. Hasil konkretnya adalah disahkannya PP No. 61/1999 pada tanggal 24 Juni 1999 yang menunjuk universitas sebagai badan hukum milik negara (BHMN). Aturan ini selanjutnya disusul keluarnya PP No. 153/2000 pada 26 Desember 2000 yang menunjuk UGM sebagai badan hukum milik negara (BHMN) bersamaan dengan UI, ITB dan IPB melalui PP No. 152, 154 dan 155.

Pertanyaannya, apakah diberlakukannya otonomi kampus (versi negara) tersebut memuaskan pihak-pihak yang dulu menuntutnya? Karena pada kenyataannya, otonomi kampus yang ditawarkan oleh negara ini berbeda dengan otonomi kampus yang dituntut mahasiswa. Otonomi Kampus yang dituntut mahasiswa secara substantif mengarah pada penuntutan kebebasan kehidupan kampus lepas dari intervensi negara serta penolakan upaya pembonsaian kritisisme mahasiswa. Sedangkan versi negara lebih menekankan pada kemandirian universitas dalam hal pedanaan proses perkuliahan.

Untuk mengerti logika dan respon mereka pada kebijakan tersebut, penting diteropong rona jalin yang melatari keluarnya kebijakan tersebut. Sosiolog muda, Arie Sujito menampangkan dua hal yang menjadi alasan signifikan di cuatkannya kebijakan otonomi kampus. *Pertama*, sebagai resultan aliran reformasi, *political will* ini dapat dimengerti sebagai reaksi atas gagalnya negara memberi

jaminan sosial dan subsidi perguruan tinggi yang disebabkan krisis ekonomi. *Kedua*, akselerasi perkembangan global institusi dihadapkan pada kompetensi (standarisasi pasar modal)

Pihak universitas sendiri melalui rektor kala itu, Ichlasul Amal, menganggap otonomi bukanlah pilihan, melainkan ikhwil yang dilematis dan tak bisa dihindari. Berdirinya PT Gama Usaha Mandiri (GMUM) tanggal 24 Juni 2000 merupakan ancaman UGM untuk swadana. PT GMUM adalah perusahaan yang berada dibawah yayasan UGM yang akan mendukung UGM dalam rangka *profit center*. Rencana dasar PT GMUM adalah, *pertama*, manajemen aset, yang dilakukan

dengan mendata aset-aset milik UGM yang belum digunakan secara maksimal. *Kedua*, restrukturisasi, yaitu mengambilalih usaha-usaha milik UGM dilakukan untuk menyalurkan pengelolaannya kedalam PT GMUM. *Ketiga*, *create* usaha baru, misalnya kerjasama PT GMUM dengan MNC (Multi National Corporation) dengan pendirian M-Web. Sampai saat ini PT GMUM telah mempunyai 23 anak perusahaan, 6 divisi kerja yang bergerak dalam perumahan-perumahan, wisata perdagangan IPTEK, dan riset serta agro bisnis. Pendirian PT GMUM ini, menurut Masoed Mahfoedz, direktur PT GMUM, merupakan alternatif pendanaan konvensional yang dipilih daripada pencarian dana lewat penarikan SPP yang bisa menimbulkan gejolak mahasiswa.

Dilain pihak, kalangan mahasiswa lebih mengambil sikap kritis dalam menghadapi kebijakan diberlakukannya otonomi kampus. Kajian-kajian mengenai otkam pun berkembang baik dikalangan organisasi ekstra maupun intra kampus, yang lantas di lanjutkan dengan protes-protes penolakan terhadap otkam. Beberapa aliansi yang sempat terbentuk pada awal-awal Otonomi Kampus digulirkan, 1999, diantaranya adalah Komite APIK (Aksi Pendidikan Kerakyatan) yang merupakan aliansi terbesar terdiri atas organisasi intra dan ekstra kampus seperti DEMA UGM, Pijar, SINTESA, KAMMI, HMI MPO

dan KAPAK. Di Fisipol sendiri terbentuk KAPAK (Kelompok Anti Pendidikan Kapitalis) yang didukung oleh SINTESA dan Kelompok Plaza Atas.

Setidaknya, ada tiga rasionalisasi yang dicuatkan mahasiswa dalam ia menolak otonomi kampus : *Pertama*, otonomi PT yang tidak sekedar swakelola tapi lebih utama swadana ternyata berdampak pada naiknya SPP mahasiswa. *Kedua*, mahasiswa tak pernah dilibatkan dalam perumusan konsep otonomi PT. *Ketiga*, PT lebih berorientasi pasar daripada pada kemanusiaan. Dikenakannya BOP (Biaya Operasional Pendidikan) pada mahasiswa angkatan 2002 adalah fakta yang

PT. GMUM merupakan alternatif pendanaan konvensional yang dipilih dari pada pencarian dana lewat penarikan SPP
Mas'oe'd Mahfudz

makin mengukuhkan benarnya rasionalisasi mahasiswa dalam menolak otonomi kampus versi negara.

Melihat begitu kompleksnya persoalan Otkam jelas menuntut mahasiswa untuk lebih jeli dan kritis dalam melihat maupun bersikap. Tidak semua semangat maupun perubahan-perubahan yang diakibatkan Otkam bersifat merugikan. Artinya, kebutuhan akan kualitas pendidikan serta *outputnya*, independensi akademis dan perbaikan kualitas layanan memiliki kesempatan untuk dioptimalkan. Pada titik inilah mahasiswa mendapatkan nilai strategisnya untuk menuntut, memberikan tawaran, dan segenap model partisipasinya.

Dengan kata lain, seindah apapun impian-impian yang diciptakan Otkam jangan sampai membuat kita terbang melayang ke awang-awang. Adalah tugas sejarah bagi kita untuk setia mengawal, mengkritisi dan tegas dalam menyikapi itu semua.

Sumber data : Majalah SINTESA dan Majalah Balairung

Gonjang-Ganjing Perihal BOP

Tiga tahun terakhir ini, 1999-2001, SPP mengalami kenaikan secara drastis. Bahkan tahun 2002 ini, UGM menaikkan biaya pendidikan dengan menambahkan komponen biaya perkuliahan selain SPP, yakni BOP (Biaya Operasional Pendidikan). Tak pelak lagi, keputusan pemberlakuan BOP banyak menimbulkan pertanyaan bagi mahasiswa. Benarkah UGM sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai institusi pendidikan yang dapat dinikmati rakyat tanpa menarik biaya yang tinggi? Tak urung, permasalahan ini menjadi kontroversi di berbagai kalangan. Dari masalah *policy making* yang cukup ruwet, masalah pengelolaan yang kurang transparan, hingga sosialisasi yang minim.

Ketika dikonfirmasi mengenai lahirnya kebijakan Rektorat tentang pemberlakuan BOP, Dr Goedono, MBA, Wakil Rektor bidang Administrasi dan Pengembangan SDM, mengatakan, "Ini semua sudah dibicarakan dalam RKU (Rapat Kerja Universitas), rapat pimpinan universitas, pimpinan-pimpinan dekanat dan pimpinan lembaga-lembaga. Lalu disana kita bicarakan macam-macam kebutuhan yang akhirnya keputusan itu harus di-SK-kan oleh rektor".

Kebutuhan-kebutuhan universitas untuk mendukung proses perkuliahan seperti kelengkapan fasilitas perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, sampai dana kegiatan mahasiswa yang memerlukan banyak biaya mendasari diberlakukannya BOP melalui SK Rektor No. 109/P/ 2002. BOP untuk fakultas eksakta sebesar Rp 750.000,00 dan fakultas non eksakta sebesar Rp 500.000,00.

Ditanya mengenai dasar penetapan besarnya BOP, khususnya Rp 500.000,00 untuk Fisipol, Prof Dr Sunyoto Usman, Dekan Fisipol

UGM mengatakan bahwa pertimbangannya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas. "Awalnya sospol mengusulkan Rp 250.000,00. Kemudian diseragamkan (dengan fakultas non eksakta lainnya, red.) menjadi Rp 500.000,00", ungkapnya. Ini menandakan bahwa sebenarnya terdapat kelebihan dana BOP yang dibutuhkan fakultas dari dana yang didapat. Lalu, mau dikemakan alokasi dari BOP itu?

Menanggapi pertanyaan itu, Sunyoto Usman mengatakan bahwa penggunaan BOP harus terkait dengan *capacity* dan *insurance building*. Misalnya saja memfasilitasi penulisan skripsi dan mengenalkan mahasiswa pada lapangan bidang studi. BOP yang tidak habis dalam masa satu tahun anggaran akan diakumulasikan pada tahun berikutnya. Jadi kelebihan dana yang ada bisa mengantisipasi kebutuhan yang lebih besar nantinya. Tapi apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut harus ditutup dengan menaikkan biaya pendidikan dari mahasiswa?

Pertanyaan selanjutnya, mengapa kenaikan SPP pada tahun 1999 dari Rp 225.000,- menjadi Rp 400.000,- kemudian dari Rp 400.000,- menjadi Rp 500.000,- pada tahun 2001 tidak banyak memberikan perubahan yang berarti, dari segi fasilitas perkuliahan? Misalnya saja di Sospol, koleksi buku-buku primer, jurnal-jurnal ilmiah yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik tidak ada penambahan yang berarti di perpustakaan, kualitas laboratorium komputer tidak banyak peningkatan, juga peralatan-peralatan praktikum yang kurang memadai (baca : ketinggalan jaman) bagi anak D3 Komunikasi, misalnya.

Dengan biaya yang lebih tinggi, sebenarnya mahasiswa berhak mendapat

pelayanan yang memuaskan seperti fasilitas perkuliahan yang memadai, dosen yang berkualitas, bimbingan akademik yang serius, dan tak kalah pentingnya adalah pelayanan birokrasi yang efisien dan ramah.

Menanggapi hal itu, Gudono menyatakan, "...saya sudah sampaikan kepada para dekan bahwa saya ingin BOP nanti betul-betul direfleksikan dalam bentuk perbaikan fasilitas dan dinikmati mahasiswa. Bentuknya apa? Ya...macam-macam". Dia memberikan contoh perbaikan fasilitas itu bisa berupa perbaikan kualitas dan kuantitas bahan untuk laboratorium, kemudian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium. Menurutnya 80% dana BOP itu harus dialokasikan untuk kepentingan mahasiswa.

Dalam kesempatan yang lain, Prof Dr Ir Edhi Martono, Msc, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengatakan bahwa BOP tidak lain digunakan untuk memelihara *resources* yang ada, termasuk jumlah tenaga pengajar, fasilitas dan sumber daya lain sebagai modal.

la menambahkan, "Kalau BOP itu (untuk) biaya operasionalnya". Menurutnya, biaya praktikum, pembelian kertas ujian, Inisiasi Kampus dan sebagainya itu diambilkan dari BOP. "Kalau itu (BOP, red.) sudah ada, maka kita akan menghapus semua pungutan yang lain, termasuk POTMA dan sebagainya. Yang ada hanya BOP *tok*, sudah! Tidak boleh ada yang lain-lain. Jadi BOP itu mengumpulkan semua yang di luar SPP universitas", jelasnya lebih lanjut.

Lalu, bagaimana reaksi mahasiswa sendiri? Suara-suara yang terdengar umumnya menyesalkan turunnya kebijakan itu. Seperti yang diungkapkan Inung, mahasiswa AN '01, "Dengan biaya kuliah mahal orang menengah ke bawah jadi berat untuk kuliah". Pendapat senada dikemukakan Atik dan Puteri, mahasiswa AN yang lain, "Adanya penarikan BOP ini, menjadikan UGM sama saja dengan swasta".

Pernyataan semacam itu menunjukkan bahwa kebijakan pemberlakuan BOP itu tidak populis, apalagi selama ini masyarakat menganggap UGM sebagai PTN yang biaya perkuliahannya murah.

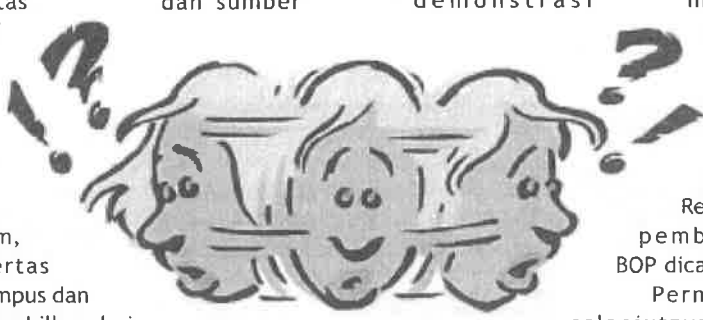
Kenyataan ini kian mengukuhkan indikasi luntarnya komitmen kerakyatan UGM. Dengan biaya perkuliahan yang semakin mahal maka UGM hanya akan bisa dinikmati kalangan menengah keatas. Hal ini tentu saja telah menutup kemungkinan rakyat bawah untuk mengenyam pendidikan tinggi di UGM.

Pemberlakuan BOP yang telah memaksa mahasiswa baru membayar biaya pendidikan kurang lebih dua kali lipat dari sebelumnya (tahun 2001) ini menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa. Respon penolakan terhadap BOP itu dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa (persma, organisasi gerakan, dan lembaga formal kampus seperti KM, BEM, LEM) yang salah satunya tergabung dalam FPKR (Forum Peduli Kampus Rakyat). Berbagai aksi demonstrasi maupun

negosiasi dengan universitas telah dilakukan agar SK Rektor untuk pemberlakuan BOP dicabut.

Permasalahan selanjutnya adalah sosialisasi BOP yang sangat *minim*. Banyak mahasiswa baru (khususnya mahasiswa non SPMB) tidak tahu bahwa disamping membayar SPP, mereka juga diharuskan membayar BOP.

Bety, mahasiswa IP '01, menyalkan hal ini. "Mereka (maba, red.) diberitahu pas membayar aja. Jadi banyak yang pulang ke *kostnya* atau minjem sana-sini". Seperti dialami adik kelas Bety yang masuk PBUD IP tahun 2002 ini yang khawatir jika tidak mendapat uang Rp 500.000,- hari itu juga (saat registrasi), maka dia akan kehilangan kesempatan menjadi mahasiswa UGM.



Kru **SINTESA** dan Komunitas Tapal Kuda mengucapkan :

SELAMAT ATAS DIWISUDANYA

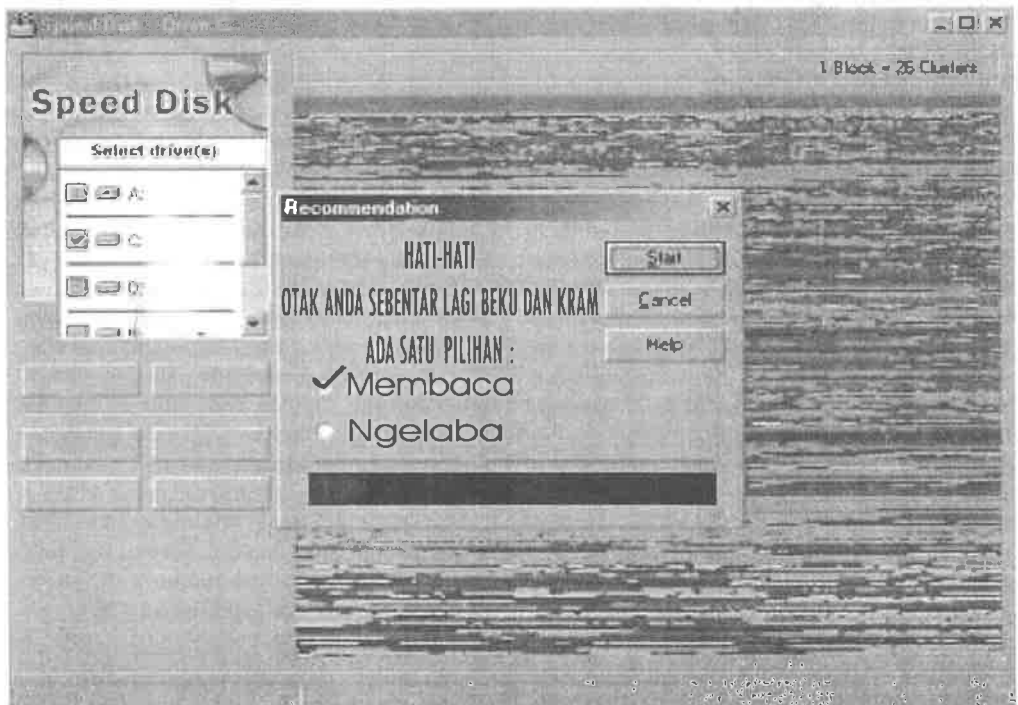
Metta Yanti, SIP
(*Komunikasi '97*)

Dede Syarif, S.Sos
(*Sosiologi '97*)

SELAMAT ATAS DITERIMANYA

Ucuk Martanto, SIP
(*Ilmu Pemerintahan '96*)

DI HARIAN KOMPAS



Iklan layanan ini dipersembahkan SINTESA untuk menyambut kawan mahasiswa angkatan 2002

Geliat UGM benahi mutu

Banyak mahasiswa setelah beberapa saat kuliah di UGM merasa kecewa dengan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Apa yang dibayangkan tentang UGM ternyata tidak sepenuhnya ditemui di sini.

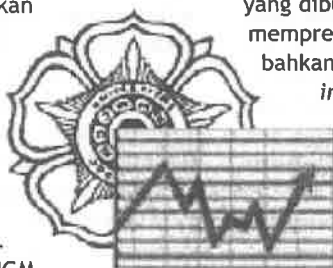
Memasuki era otonomi kampus, UGM dituntut melakukan pembenahan dalam banyak hal. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang selama ini tidak banyak menunjukkan peningkatan. Padahal, di era otonomi kampus, pendidikan dituntut lebih berwawasan ke depan dan lebih inovatif. Kondisi pengajaran di UGM saat ini belum banyak berubah. Masih sering ditemui dosen mengajar tanpa menyiapkan materi terlebih dulu, cara pengajaran yang masih konservatif -dosen ceramah tanpa membuka kultur dialog. Selain itu, dari segi fasilitas penunjang seperti perpustakaan juga masih jauh dari ideal. Hal tersebut menguatkan hipotesis bahwa kualitas pendidikan di UGM tidak sebagus yang dicitrakan.

Risau dengan kualitas pendidikan yang belum banyak meningkat, pihak rektorat mengulirkan program Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi (JMPT). Sebuah program yang ingin memastikan mutu produk

atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten dengan yang ditawarkan. Analogi yang digunakan, UGM adalah sebuah pabrik yang harus punya standar baku menyangkut produk yang dihasilkan demi kepuasan para klien.

Lebih jelasnya, lulusan UGM

nanti diharapkan benar-benar ahli di bidangnya dan kompetitif dalam dunia yang telah demikian disetir logika kapital. "Kalau kita tidak memiliki mutu yang tinggi, kita tidak akan diterima masyarakat. Masa depan itu mutu masyarakatnya sangat tinggi", demikian ungkap Ir Haryana M. Arc, Wakil Ketua kantor JMPT.



Sosialisasi dari program JMPT sendiri telah dilakukan dengan penyelenggaraan lokakarya di seluruh fakultas, untuk menyemaikan dan menangkap feedback dari pihak fakultas. Sedangkan operasionalisasinya, pihak JMPT memberi keleluasaan pada masing-masing fakultas, jurusan, program studi untuk menentukan standar kompetensi lulusan yang dihasilkannya. "Kebebasan itu jelas dari fakultas dan jurusan yang tiap hari bersinggungan dan otoritas kita hanya sekadar memberi alat dan mengatur format penyiapan belajar dan mengajar, tidak lebih", jelas Haryana. Ia mencontohkan, "Misalnya kita perlu mendorong jurusan untuk membuat standar kemampuan yang harus dimiliki mahasiswanya, kemudian itu diserahkan pada Universitas".

Dalam mengakomodasi kompetensi jurusan atau program studi, JMPT juga mendorong dosen untuk membuat perencanaan kuliah lebih matang. Membuat silabus mata kuliah beserta referensi literatur yang dibutuhkan. Untuk dosen yang kesulitan mempresentasikan kuliahnya secara menarik,

bahkan tengah disiapkan *Center for Teaching and Learning* untuk melatih dosen agar dapat mengajar efektif. Sehingga diharapkan kuliah berlangsung lebih menarik dan antusias mahasiswa juga bertambah. Dengan begitu mahasiswa diharapkan lulus tepat pada waktunya, yaitu empat tahun sesuai dengan rencana. "Jadi seperti Fak. Ekonomi yang 80%-90% lulus pada tahun keempat dan mahasiswanya menguasai ilmunya", sambung Haryana.

Lalu, sebenarnya apa saja yang ditawarkan oleh program JMPT sendiri? Program ini pada dasarnya menekankan empat

hal sebagai bagian kompetensi yang harus dimiliki pihak jurusan serta mahasiswa. *Pertama*, pemahaman ilmu yang menjadi esensi program studi masing-masing. Jadi, misalnya mahasiswa Administrasi Negara tidak lagi direpotkan dengan batasan keilmuannya dengan Ilmu Pemerintahan. Atau mahasiswa jurusan Sosiatri tidak lagi dibingungkan jati diri jurusannya, apakah menekankan pada penanggulangan penyakit sosial ataukah sebagai ilmu pembangunan masyarakat. Sebab wilayah pembedaan keilmuan itu harus sudah ditekankan masing-masing jurusan.

Kedua, adalah kemampuan berfikir. Sebagai mahasiswa Sospol yang tiap hari bergelut dengan teori-teori sosial dan politik, kita diharapkan tidak lagi gagap untuk melihat dan menganalisis fenomena-fenomena sosial yang tiap hari menghampiri kita. Sehingga kepekaan melihat fenomena sosial politik menjadi perlu dikembangkan disini.

Ketiga, adalah kemampuan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan bekerja sama dengan orang lain atau biasa disebut kemampuan manajerial. Sedang kemampuan terakhir yang ditekankan adalah kemampuan untuk mengaplikasikan keilmuan yang kita dapat dari ruang kuliah. Untuk itu sekaligus disiapkan ketrampilan pendukung untuk pemecahan masalah di lapangan.

Tawaran rektorat memang beragam, sehingga kita di Sospol berpikir apa juga harus menguasai semua hal itu. Apakah kita juga diharuskan punya kemampuan praktis menyelesaikan masalah secara mendasar. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan bidang Akademik, Dr Pratikno M.Soc.Sc menyatakan "Tidak semua ilmu sosial itu berorientasi pada pemecahan masalah, untuk sekedar pemetaan masalah pun itu sudah sangat bagus." Namun begitu ia menekankan semangat yang sebenarnya ingin diusung dalam program JMPT ini. "Yang lebih penting adalah menangkap *spirit* JMPT untuk memanfaatkannya dalam rangka mobilisasi energi dan memperbaiki proses pendidikan", jelasnya.

Selanjutnya, apakah sejauh ini efektivitas JMPT sudah terencana rapi? Otoritas JMPT yang hanya sebatas pengaturan format penyiapan, tanpa adanya mekanisme ganjaran dan hukuman yang jelas pada sisi lain dapat

berakibat pada pelaksanaan itu sendiri. Yaitu masih terbukanya peluang untuk terjadinya pelanggaran pada rencana pengajaran yang telah ditetapkan sendiri. "Kontrolnya lebih banyak diberikan di Fakultas, kita hanya merekomendasikan ke Wakil Rektor I", ujar Haryana. Namun begitu pada tingkatan Fakultas pun ternyata tidak ada mekanisme ganjaran yang jelas. Menanggapi hal ini Pratikno menjelaskan, "Itu diluar kapasitas kita karena sampai saat ini fakultas tidak memiliki mekanisme seperti penundaan kenaikan pangkat atau pun gaji, tapi pada level jurusan itu menjadi *pressure sosial*", jelasnya.

Lebih lanjut, Haryana mengingatkan bahwa kekhawatiran tentang tidak konsistennya pelaksanaan dengan rencana yang sudah dicanangkan tidak perlu ditakutkan lagi. "Saya kira semuanya telah dewasa, sudah ingin jurusannya survive dalam kelanjutannya", ungkapnya. Untuk itu, Pratikno menyarankan agar keberadaan UGM sebagai BHMN dapat dimanfaatkan. Karena dosen adalah staf internal bukan pegawai negeri lagi, sehingga mekanisme punishment-nya tak lagi harus terbentur birokrasi yang panjang. Keputusannya cukup diambil di jajaran universitas.

Selain itu, UGM yang menyediakan begitu banyak komunitas belajar dan organisasi untuk lebih membuka kesadaran kita atas realitas sosial perlu juga mendapat perhatian dalam konteks pendidikan di Sospol. Karena untuk pendidikan di Sospol tidak bisa hanya berpijak pada kemampuan akademis dalam kelas. Pihak Fakultas sendiri sedang memikirkan bagaimana membuat jembatan yang menghubungkan antara aktivitas intra dengan aktivitas ekstra masuk kedalam kurikulum. "Jembatan ke dua jalur tadi adalah bagaimana metodologi pengajaran kita juga mengalami perubahan, saya kira itu akan berjalan gradual", ungkap Pratikno.

Di luar semua perdebatan, optimisme ataupun skeptisisme terhadap JMPT ini, tetap yang terpenting di sini adalah kekritisan kita dalam membaca dan bersikap. Sejahul apa guliran program ini, harapan kita sederhana saja, semoga ini bukan sekadar geliatan sesaat tanpa *follow up* yang jelas. Semogal

Nanang

JMPT *ala* Sospol "seberapa siapkah?"

Ketika universitas mensosialisasikan program JMPT (Jaminan Mutu Perguruan Tinggi) di Fisipol pada tanggal 26-27 Juni 2002 yang lalu, banyak memunculkan pertanyaan. Bagaimana tidak, universitas dengan JMPT-nya fakultas untuk menentukan standar kompetensi lulusan dengan indikator lama studi dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Standar kompetensi tersebut sangat kuantitatif dan sulit diterapkan di Fisipol yang *notabene* mempelajari ilmu-ilmu sosial dan politik. Penilaian terhadap mahasiswa tidak cukup dari hasil dan lama studinya saja. Aspek eksternal seperti aktivitas di luar perkuliahan rutin, berorganisasi misalnya, pada kenyataannya memang sangat mendukung kecakapannya dalam hal akademis dan pemahamannya atas disiplin ilmu yang digelutinya. "Universitas itu berfikir keberhasilan identik dengan kompetensi, mereka akan sulit karena sebenarnya masyarakat punya logika sendiri", cetus M. Supraja, staf pengajar jurusan Sosiologi, menanggapi hal ini.

Kompetensi lulusan yang ditawarkan universitas diharapkan dapat diterima masyarakat, maksudnya lulusan yang dikeluarkan nantinya bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika memenuhi standar yang ada. Namun hal itu bisa membuat mahasiswa menjadi berpikir pragmatis, dimana mahasiswa hanya akan menyibukkan dirinya dengan kuliah saja untuk bisa memenuhi standar universitas tersebut (lama studi dan IPK). Dan ini tentunya membuat mahasiswa menjadi jauh dari realitas yang ada bahwa pendidikan itu tidak hanya didapat dari pendidikan formal (bangku kuliah) saja, tetapi bisa didapat juga dari interaksi dengan lingkungan sekitar. Kekhawatiran yang muncul, mahasiswa yang hanya berkulat dengan kuliahnya saja akan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan. Seperti yang dikatakan

Supraja, "Pendidikan formal itu memang lebih cenderung untuk mencetak manusia yang punya skill, ketrampilan tertentu, tapi tidak punya sense of humanism".

Namun demikian bukan berarti semua standar kriteria yang ditawarkan JMPT tidak sesuai untuk diterapkan. Perbaikan kualitas pendidikan yang ditawarkan JMPT itu memang perlu. Dari perbaikan kualitas dosen, kurikulum dan silabus mata kuliah, juga fasilitas yang mendukung proses perkuliahan, termasuk kelengkapan perpustakaan. Karena memang sampai saat ini beberapa hal tersebut masih kurang mendapat perhatian.

Untuk itulah dengan adanya JMPT itu diharapkan akan memacu jurusan (sebagai pembuat kurikulum dan silabus mata kuliah) untuk dapat mengembangkan jurusannya sehingga bisa menarik banyak peminat dan menghasilkan lulusan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dan nantinya jurusan yang memenuhi kriteria tersebut yang akan menjadi unggulan. Hal ini dipertegas oleh Ir. Haryana, M.Arc, Wakil Ketua Kantor JMPT, "Jurusan unggulan itu bila memiliki kompetensi lulusan yang betul-betul mudah terserap di masyarakat lokal, regional, sampai internasional".

Ditanya soal kesiapan jurusan sendiri dengan penerapan JMPT tersebut, Drs. Purwanto, SU, M Phil, Ketua jurusan Sosiologi mengatakan, "Sebenarnya sebelum ini pun jurusan kami sudah membuat perbaikan kurikulum dan silabus. Jadi JMPT ini formalitas saja". Namun demikian perbaikan kurikulum dan silabus tidak akan berhasil tanpa didukung oleh kesiapan dan kualitas dosen yang ada. "Melihat potensi atau peluang, diharapkan dengan sosialisasi kemarin (JMPT), dosen akan mempunyai kesadaran tinggi untuk perbaikan perkuliahan", Purwanto menambahkan.

Bersambung ke hal. 26

wawancara utama

“....pragmatisme di dunia pendidikan tidak dapat kita hindari”

M. Supraja, SH, S.sos



UGM yang dikenal sebagai kampus rakyat, kini ditengarai mengalami banyak pergeseran dalam memaknai pendidikan. Idealita pendidikan semakin bergeser ke arah pragmatisme. Otonomi Kampus yang melahirkan aturan pembatasan studi ditambah semakin melangitnya biaya kuliah yang dibebankan, memaksa mahasiswa untuk bergegas menyelesaikan studi -yang bertendensi pada penafian perihal pentingnya proses penggodokan dan pematangan mahasiswa di dalam kampus serta semakin mengukuhkan lunturnya komitmen kerakyatan UGM. Sehingga proses kelahiran intelektual-intelektual dari dunia kampus serta merta terancam, atas nama efisiensi dan keharusan kompromi dengan tatanan global yang kapitalistik. Bagaimana sebenarnya carut marut pemaknaan esensi pendidikan di UGM?

Berikut wawancara dengan M. Supraja, SH, S.sos, staf pengajar jurusan Sosiologi, yang banyak mendalami sosiologi pendidikan.

Bagaimana pemaknaan Anda tentang pendidikan?

Pendidikan adalah sesuatu yang luas sekali. Ada yang bilang itu bukan sekedar mencetak manusia sehingga dia punya keahlian. Ada juga yang bilang itu humanisasi. Pendidikan yang paling esensial adalah proses pemanusiaan manusia. Proses itu mencakup kepemilikan dia terhadap *skill*, kemampuan dia untuk berfikir, menggunakan perangkat-perangkat logika dan sebagainya. Kalau saya cenderung melihat pendidikan dalam arti yang lebih komprehensif, mencakup segala hal. Ya proses pemanusiaan, humanisasi, juga termasuk proses menguasai atas keterampilan-keterampilan tertentu sebagai penopang hidup.

Lalu bagaimana gambaran komprehensif mengenai pendidikan tinggi?

Berbicara tentang pendidikan tinggi, sama artinya berbicara tentang pendidikan formal. Pendidikan formal biasanya tidak bisa lepas dari berbagai macam tujuan yang sebagian besar ditentukan oleh lembaga formal itu. Misalnya soal kompetensi. Tapi yang terpenting dari tujuan pendidikan adalah *being educated* menurut saya. Karena keterampilan, *skill* itu sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diperoleh dengan usaha keras. Itu yang saya bilang pendidikan dalam arti komprehensif adalah *being educated*. Bagaimana orang menjadi insan yang terdidik, yang bisa hidup dalam berbagai macam situasi, dan ia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, *being educated* menurut saya seringkali diabaikan dalam pendidikan formal. Memang kita tidak dapat menuntut banyak dari pendidikan formal, karena ia lebih cenderung untuk mencetak manusia yang punya *skill* tapi tidak punya *sense of humanisme*.

Berkaitan dengan kondisi obyektif UGM sekarang, menurut Anda masih adakah idealita pendidikan itu?

Yang jelas, ketika UGM sudah mencanangkan era Otonomi Kampus, kita sudah bisa melihat ada pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan. Dulu di era 80-an, di masa saya kuliah di Fisipol, terasa sekali banyak kelompok diskusi, ada organisasi ekstra yang pengaruhnya sangat bisa dirasakan di level mahasiswa. Sementara kini perannya sudah semakin berkurang. Lalu di level institusi sendiri misalnya, biaya pendidikan yang mulai mahal. Tidak semua orang bisa mengenyam

pendidikan tinggi.

Di satu sisi memang ada keinginan pihak universitas untuk membuat lembaga pendidikan ini makin profesional, ada penataan-penataan, perbaikan-perbaikan. Tapi di sisi lain memang nampaknya tidak bisa dihindari untuk mengeksploitasi banyak sumbangan pendidikan yang dananya diambil dari mahasiswa, itu perubahannya. Di tingkat global, pengaruh NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat, *red.*) ini juga yang kemudian memberi mahasiswa banyak pilihan, apakah ia akan aktif di lembaga intra atau ekstra kampus, ataukah di NGO.

Mahalnya pendidikan di UGM serta digulirkannya JMPT di mana salah satu tawarannya adalah kompetensi lulusan yang penilaiannya cenderung kuantitatif, ditakutkan akan mengarahkan mahasiswa pada pragmatisme. Bagaimana Anda memandang fenomena ini?

Memang sudah tidak dapat dihindari (pragmatisme, *red.*). Gejala seperti itu sudah lebih dulu terjadi di negara-negara maju. Kalau disini sedang menuju pragmatisme, disana sudah sangat pragmatis. Mahasiswa disana belajarnya sedikit tapi mereka menuntut nilai yang tinggi dari dosennya. Di UGM sendiri tinggal tunggu waktu. Dan pada akhirnya hukum ekonomi tidak bisa dipungkiri akan menyetir kehidupan dunia kampus. Ada efisiensi waktu. Orang akan berfikir sekian kali untuk mengalokasikan waktu ke sektor-sektor yang lebih produktif secara ekonomi daripada ia memberikan banyak waktu di kampus. Saya lihat di UGM, mungkin sedang proses menuju otonomi, lambat laun akan seperti itu.

Dengan kata lain, apakah memang pragmatisme adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari bahkan mungkin suatu kewajaran?

Di satu sisi memang kita masih punya idealisme, ingin menata kampus supaya menjadi *centre of excellence*. Ada pemikiran-pemikiran yang segar, alternatif dan kritis di kampus. Tapi di sisi lain, kita berhadapan dengan sebuah tata dunia yang kapitalistik, yang membuat institusi pendidikan juga harus menyesuaikan diri.

Kalau kita mau kritis uang yang

digunakan untuk membangun gedung-gedung baru yang megah di UGM ini sebagian hibah dan sebagian pinjaman. Lalu, bagaimana cara mengembalikannya? Mungkin sebagian nanti akan dibayar oleh kampus dan sebagian mungkin dibayar pemerintah. Kalau dibayar oleh kampus pasti mengambil dana itu sebagian dari mahasiswa.

Mungkin benar apa yang dikatakan Edward Said, bahwa kita memang tidak bisa berharap sangat idealis dengan dunia kampus. Kalau seandainya kampus masih punya tandon-tandon untuk berfikir kritis, ada pusat-pusat dimana orang bisa berkumpul, berargumentasi, mengajukan pikiran-pikiran alternatif yang berbeda dengan *mainstream*, maka itu sangat bagus. Jadi ada ruang-ruang bagi orang untuk berfikir kritis tanpa rasa takut.

Pragmatisme cenderung mengarahkan mahasiswa pada keengganan dia untuk beraktivitas di luar kelas, bahkan menimbulkan keapatisan mahasiswa terhadap realitas di sekitarnya. Bagaimana dengan hal tersebut?

Sama sekali kita tidak bisa mengeliminasi pragmatisme dari dunia kampus. Namun sangat mungkin di alam yang pragmatis itu masih ada orang yang idealis. Tapi sangat susah kalau kita berbicara pada tingkat institusi. Pragmatisme ini akan berakibat sangat luas. Mahasiswa tidak akan mau berlama-lama di kampus. Karena menunda lebih lama kelulusan artinya membayar lebih banyak. Lalu mahasiswa juga melihat kampus tidak hanya sebagai institusi yang membuahkan pikiran-pikiran kritis, tapi juga melihat kampus ini sebagai lahan yang potensial untuk mengadakan interaksi-interaksi ekonomis dengan sesamanya sehingga mendatangkan keuntungan. Jadi tidak lagi melihat kampus sebagai arena perjuangan idealistik, tapi kampus juga dilihat sebagai ladang yang memiliki potensi ekonomi yang besar sekali.

Berkaitan dengan pernyataan diatas, universitas bisa dikatakan bagus ketika ia masih mampu menyediakan ruang-ruang untuk berpikir kritis. Melihat konteks UGM saat ini, masih adakah ruang-ruang itu?

Di UGM kita punya banyak pusat studi,

lembaga kajian kebijakan. Tapi seperti kritik-kritik yang sering muncul bahwa sebagian besar pusat-pusat studi ini lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk mencari uang. Sedikit mungkin pusat studi yang memiliki dimensi idealistis, mengembangkan humanisme, dan sebagainya. Dan ketentuan yang ada sekarang bahwa pusat studi harus dapat mendatangkan keuntungan untuk universitas. Dengan beban seperti itu, apa mungkin kita bisa membangun *centre of excellence* yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis, alternatif, reformis? Pusat studi seharusnya dibiayai oleh universitas dan tidak *profit oriented*.

Kalau seandainya pusat studi itu didirikan, saya kira UGM bolehlah mengklaim sebagai universitas kerakyatan. Mungkin nggak perlu banyak (didirikan pusat studi, *red.*). Satu saja didirikan pusat studi yang isinya adalah intelektual-intelektual dari beragam disiplin ilmu. Karena yang selama ini ada memang sangat partikularistik. Ilmu sosial ya ilmu sosial. Sama sekali kadang nggak berkolaborasi dengan mereka yang berasal dari disiplin pengetahuan lain. Padahal kalau kita menggunakan wawasan pengetahuan yang holistik, apa mungkin masalah sosial dipisahkan dengan masalah kealaman secara *saklek*? Dalam paradigma holistik kita harus melihat masalah itu secara utuh dan tidak bisa dari perspektif yang sangat partikularistik.

Bagaimana menurut Anda melihat realitas bahwa biaya pendidikan di UGM itu semakin mahal, jika dikaitkan dengan jargon UGM sebagai kampus rakyat?

Kita pernah mengkritisi otonomi kampus ini lahir dalam situasi yang tidak tepat, karena di satu sisi negara kita sedang mengalami krisis ekonomi, sosial, politik, sedang di sisi lain ada niatan dari negara untuk mendelegasikan sebagian kewenangan itu pada masyarakat. Tapi mendelegasikan disini juga berarti mengurangi subsidi pendidikan bagi UGM. Dan itu sangat disayangkan karena eranya adalah era krisis. Ketika masyarakat tidak berdaya, ketika pemerintah mengalami krisis keuangan, kemudian mereka serahkan

masalah (biaya, *red.*) pendidikan kepada masyarakat. Jangan-jangan ini salah satu trik pemerintah untuk lepas tangan dari masalah-masalah pendidikan. Padahal dukungan pemerintah terhadap pendidikan itu sangat penting.

Di negara lain kita tahu anggaran pendidikan itu besar sekali. Sedang di Indonesia sendiri sangat kecil. Belakangan baru diusulkan sebesar 20% dari APBN. Tapi kalau APBN-nya kecil maka 20% nya juga kecil. Jadi memang komitmen pemerintah terhadap masalah pendidikan masih sangat minimal. Akan sangat menarik kalau seandainya otonomi diberikan tetapi subsidi pemerintah tetap besar. Subsidi saya maknai sebagai wujud komitmen pemerintah. Dengan subsidi yang besar maka universitas bisa memberikan kesempatan luas pada mereka yang tidak mampu (secara ekonomi, *red.*) untuk studi.

Sementara ini, ketika otonomi kampus digulirkan, orang sudah menganggap UGM bukan lagi kampus rakyat. Karena sekolah disini tidak ringan biayanya. Hanya orang-orang dari golongan menengah ke atas yang bisa sekolah disini. Meskipun kita juga ada kecemasan kalau otonomi tidak dikelola dengan baik, itu juga ada ancaman. Misalnya ada tirani dari pihak pengelola universitas untuk membuat *policy-policy* yang tidak populer sehingga praktek-praktek *perkoncoan*, *nepotisme* bisa saja nanti berkembang di UGM. Itu tanda-tanda kematian bagi UGM, karena

ia akan merekrut banyak orang yang sebenarnya tidak cukup *qualified* untuk belajar di UGM. Kita lihat misalnya kecenderungan-kecenderungan (banyak dibukanya, *red.*) diploma, ekstensi. Mereka-mereka yang punya uang banyak, merekalah yang punya kesempatan lebih untuk mengenyam pendidikan di UGM.

Rui, Aviet

wacana

Tentang Pendidikan : Sebuah Catatan Awal Untuk Kawan Mahasiswa Baru

Sekolah dalam terminologi masyarakat Yunani identik dengan kata *skhole*, *scola*, *scolae* atau *schola*. Keempatnya mempunyai arti "waktu luang yang digunakan untuk belajar". Istilah ini digunakan oleh kaum sofis untuk mengisi waktu luang dengan cara mengunjungi suatu tempat atau mempertanyakan hakikat kehidupan. Maka tidak mengherankan bila sekolah juga disebut akademik yang berawal dari kata *academicus* yang berarti bertanya. Sekolah kemudian bermetamorfosa dari pendidikan *a la* kaum sofis menuju pola yang terlembaga. Namun model ini mendapat banyak kritik karena lebih banyak mengajarkan kepatuhan, dimana individu didalamnya menjadi tunduk dan jinak pada asupan-asupan yang diberikan dan bukannya mencari jawaban secara lebih kritis atas realitas yang melingkupinya. Hal ini akan sangat berbeda dengan pendidikan model Socrates, dimana pertanyaan tentang realitas sekitar dan kehidupan serta aktivitas yang melingkupi hidup manusialah yang dipertanyakan. Pendidikan model seperti inilah yang memberikan manusia sebuah kesadaran kritis akan hakikat manusia itu sendiri.

Aktivitas keseharian manusia tidak lepas dari kerja pikir untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang hidup. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan tentang hidup. Pengetahuan adalah obyek yang menjadikan kita tahu tentang realitas, tidak sekadar realitas inderawi akan tetapi juga maknanya. Aktivitas berpengetahuan ini membuat kita mencoba mencari jawaban atas ketidaktahuan. Jawaban-jawaban ini sedikit demi sedikit terberikan secara menyeluruh dan sistematis seiring kebutuhan dan kepuasan manusia. Proses seperti inilah yang mewarnai

konsep awal pendidikan, sekolah dan aktivitas pengenalan pengetahuan.

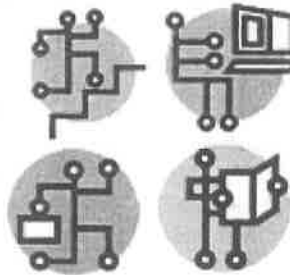
Pendidikan menurut tesis Driyarkara (1980: 32-33) adalah fenomena fundamental dan asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa dimana ada kehidupan manusia disitu pasti ada pendidikan. Akan sangat sulit untuk menyebut aktivitas personal satu-satu secara tersendiri seperti makan-minum dan mandi sebagai pendidikan. Driyarkara bahkan menyebutkan bahwa kita tidak bisa berkata seorang ayah sedang sibuk

mendidik anaknya. Demikian juga dari pihak anak tidak ada sesuatu yang secara tersendiri kita sebut "dididik". Lalu dimana letak pendidikan? Pendidikan terjadi dengan dan hidup bersama. Disitu ada aktivitas yang secara tersadari atau tidak, disengaja atau tidak telah memasukkan manusia muda kedalam alam

atau dunia manusia melalui perbuatan mendidik.

Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini berarti bahwa hidup dan tumbuhnya anak-anak berada di luar kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrati itu agar dapat memperbaiki lakunya (bukan dasarnya) hidup dan tumbuhnya (Dewantara, 1977:20-21).

Implementasinya dilakukan oleh seorang pendidik Amerika latin, Paulo Freire. Freire memposisikan pendidikan memiliki tujuan akhir pembebasan. Konsep pendidikan adalah



hasil refleksinya atas kondisi masyarakat Brasil yang terpuruk dalam ketertindasan rezim otoriter militer. Keprihatinan paling asasi adalah proses dehumanisasi masyarakat dari kebijakan pemerintahan otoriter. Permasalahan humanisasi adalah satu-satunya fitrah manusia yang harus diperjuangkan. Diperjuangkan dari mereka yang telah merampas kemanusiaan dengan mengingkarinya, memperlakukan tidak adil, pemerasan dan penindasan. Permasalahan ini dipropagandakan tidak hanya lewat satu cara, tetapi penguasaan atas sistem politik, sosial dan budaya memudahkan rezim otoriter melakukan dehumanisasi dalam segala penjuru, salah satunya pendidikan sekolah. Dari sinilah kemudian muncul konsep pendidikan kaum tertindas.

Pendidikan kaum tertindas adalah sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa mereka sendiri maupun kaum penindasnya adalah pengejawantahan dari dehumanisasi. Kebebasan karenanya adalah ibarat kelahiran bayi yang menimbulkan rasa sakit. Manusia yang terampil adalah manusia baru yang dapat hidup terus jika kontradiksi penindas-penindas telah digantikan dengan humanisasi segenap manusia. Dengan kata lain, pemecahan kontradiksi ini dicapai melalui rasa sakit beranak yang mengantarkan manusia baru tadi ke dunia bukan untuk menjadi penindas atau orang tertindas, tetapi menjadi manusia dalam proses mencapai kebebasan (Freire, 1985: 19).

Tesis Freire lainnya adalah bahwa pendidikan masa atau institusi pendidikan merupakan salah satu instrumen dari aksi kebudayaan menindas yang hampir tidak terlihat oleh para ahli. Aksi ini mempunyai misi propaganda untuk menginjeksi pemahaman. Mereka menekankan pemahaman terhadap berbagai masalah secara terkotak-kotak (subsisten) dan bukan memahaminya sebagai dimensi dari totalitas yang komprehensif. Terlihat dari pendidikan tradisional yang telah mereproduksi praktek-praktek sosial yang cenderung menjaga keberlangsungan budaya bisu. Kebudayaan kita dari awal telah menciptakan kecenderungan *masochis* untuk patuh pada kekuasaan, dan di lain pihak kecenderungan untuk berkuasa. Kebiasaan ini

mengkondisikan manusia untuk patuh dan beradaptasi pada kondisi yang tentu saja menaklukkan, dan bukan untuk berintegrasi dengan realitas. Dari sini kemudian lahirah pendidikan gaya bank, sebuah kegiatan menabung. Peserta didik merupakan bejana-bejana kosong yang harus diisi dengan pernyataan-pernyataan dan pengetahuan para penguasa yang harus dihafal, diterima dan diulangi dengan kepatuhan. Pendidikan model ini memberikan aktivitas tanpa dialog, tanpa partisipasi, menyesuaikan diri terhadap keadaan yang dipaksakan dan menuntut kerangka berfikir yang tidak kritis.

Pendidikan merupakan konstruksi masyarakat dalam mentransformasi pengetahuan. Dan pendidikan merupakan instrumen bagi sosial untuk mengenalkan konsep-konsep dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pendidikan juga merupakan instrumen dari aksi kebudayaan artinya pendidikan berarti pendidikan merupakan alat taktis mencapai tujuan dan kepentingan pelaku pendidikan. Oleh karena itu masyarakat modern mencoba mengkonstruksikan kepentingannya akan pendidikan dan pengetahuan dalam sebuah proses institusionalisasi atau pelebagaan pengetahuan. Proses penciptaan sekolah tidak terlepas dari aktivitas pikiran yang mencoba menyelaraskan dan memapankan pengetahuan. Logika ini menyiratkan korelasi aktivitas untuk menyelaraskan dan memapankan proses pengenalan pengetahuan dengan aktivitas keseharian manusia. Proses pelebagaan pengetahuan inilah yang kemudian menciptakan sekolah sebagai model pendidikan modern. Sekolah sebagai institusi pendidikan modern menyediakan sebuah waktu luang dan metode yang sistematis bagi manusia untuk mempertanyakan tentang pengetahuan. Sekolah model ini merupakan perkembangan dari ide kaum sofis di Yunani dimana pelebagaan pendidikan dilakukan dengan bayaran.

Melalui proses pelebagaan sekolah, proses transfer pengetahuan antar personal diambil alih dan disatukan dalam kebutuhan yang sama, yaitu keinginan untuk menguasai pengetahuan akan tetapi bersifat kolektif. Aktivitas persekolahan terkait dengan proses

transfer pengetahuan antara guru dengan murid, tentu saja atmosfer kebijakan kelembagaan akan sangat mempengaruhi interaksi ini. Sekolah adalah kumpulan relasi personal yang dilembagakan sehingga kuasa institusi oleh perangkat institusi disisihkan ke dalam legitimasi sekolah untuk mengatur semua elemen pendidikan. Akibatnya persebaran kuasa dengan motif pendisiplinan dan pengawasan kesadaranpun telah disisihkan ke dalam sekolah, barak militer, rumah sakit, kampung dan rumah yatim piatu.

Sekolah menjadi institusi penting sebagai salah satu institusi kontrol dan pengawasan. Apalagi dalam konsep idealnya sekolah adalah institusi reproduksi dan sosialisasi kebutuhan hidup. Lebih strategis lagi sekolah secara mendalam terus menerus dan secara otomatis menjalankan fungsinya mempunyai kepentingan menjadikan siswa takluk, patuh dan berguna. Sebenarnya penaklukan dan kepatuhan hanyalah bahasa yang lebih halus daripada hukuman fisik karena proses menguasai ini berada pada tataran pengaruh kesadaran, kehendak, dan kemauan. Ketika kekuasaan pengetahuan oleh individu ataupun oleh institusi mengenai targetnya dan sasaran mengalami inferioritas maka yang tercipta adalah terhegemoninya sasaran itu.

Selain permasalahan diatas, masalah pendidikan di dunia ketiga termasuk Indonesia mengandung asumsi bahwa tingkat pendidikan mempunyai tingkat hubungan yang signifikan dengan besarnya penghasilan, barang-barang dan status sosial. Selanjutnya pendidikan diandalkan untuk mobilitas vertikal. Sebagai akibatnya sekolah lantas berubah menjadi pabrik ijazah yang diperlukan untuk memasuki ruang peradaban modern. Dengan kata lain pendidikan di dunia ketiga ditata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan satu golongan minoritas yang sangat kecil dan sekaligus melanggengkan mitos yang menyatakan bahwa melalui sekolah, individu akan mampu memasuki lapangan kerja dalam sektor modern.

Dalam konteks pendidikan, institusi bernama sekolah bekerja sebagai instrumen negara dan dunia industri untuk mencetak manusia-manusia mekanis dan bias kesadaran kritis. Saat negara melakukan intervensi ke dalam komponen masyarakat dan menanamkan pengaruhnya, pada saat bersamaan kepentingan penguasaan ekonomi, sosial dan politik oleh institusi di luar pendidikan memasuki ranah pendidikan sehingga sekolah menjadi aset bagi terkelolanya kapital. Pada tataran inilah pendidikan, sekolah, *dus* pelakunya menjadi obyek yang hendak dijinakkan dan dipatuhkag. Inti dari percakapan ini adalah bahwa sekolah mempunyai fungsi hegemoni. Sekolah memanfaatkan legitimasinya atas pengelolaan pengetahuan sebagai kapital atas eksistensinya.

Pendidikan seharusnya menyadarkan masyarakat bahwa kaum tertindas bukanlah kaum pinggiran, bukan juga orang yang hidup di luar masyarakat. Mereka berada di struktur yang justru mengada untuk orang lain. Pendidikan bertugas mengubah struktur tersebut agar mereka dapat menjadi makhluk bagi dirinya sendiri bukan obyek yang

dengan mudah dijinakkan oleh kepentingan yang telah

melingkupi atmosfer pendidikan. Praktek selanjutnya mengimplikasikan konsep pendidikan tentang manusia dan dunia, konsep tentang manusia tentang kejelasan tujuan hidup dan

memperoleh pengetahuan. Pendidikan sebagai instrumen pembebasanlah yang menjadi tujuan Freire dan Socrates agar pendidikan mampu menghumaniskan manusia dalam sebuah kesadaran kritis tentang dirinya dan lingkungannya.

Selamat datang di dunia akademik dan selamat menjadi mahasiswa Sospol yang siap mengusung nilai-nilai pendidikan humanis. *Proviariat !!!*

Pascal, Retno

MAHASISWA AKTIVIS !

(Anak SOSPOL : Bukan Sekadar Anak Kuliah)

Masih segar dalam ingatan kita peringatan 100 tahun Bung Hatta sebulan silam. Anak Minangkabau yang kemudian dikenal sebagai salah satu bapak proklamator ini, menghabiskan masa mudanya di Belanda sebagai mahasiswa dan aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia. Hatta hanyalah salah satu orang dari banyak mahasiswa yang terlibat dalam aktivis gerakan dan kemudian menjadi tokoh dan orang besar di dunia. Sebutlah seperti Sjahrir, Sun Yat Tsen, Benazir Bhutto dan yang lainnya.

Menjadi mahasiswa adalah suatu kebanggaan, pada awalnya. Bagaimana tidak, beragam cerita tentang pergerakan mahasiswa yang penuh nuansa heroik terabadikan. Sejarah panjang bangsa ini disepakati atau tidak telah menempatkan sosok mahasiswa sebagai aktor penting dalam setiap perubahan sosial yang ada. Pergeseran kekuasaan, perubahan struktur pemerintah dan pergolakan-pergolakan yang berdampak besar terhadap negara ini tak pernah lepas dari peran mahasiswa sebagai lokomotifnya.

Menjadi mahasiswa juga sekaligus seakan *meneken* kontrak sebagai bagian dari gerakan sosial. Kenyataan bahwa ia adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesempatan dan waktu lebih dalam mengakses dan menggali ilmu pengetahuan, sekaligus menikmati kultur akademis yang memberinya dasar pola berpikir yang analitis, kritis dan sistematis memunculkan konsekuensi untuk selalu kritis dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks inilah pentingnya *proses penggodokan* mahasiswa ditekankan. Apakah memang ia telah cukup sadar atas tuntutan peran yang melekat pada statusnya? Ataukah ia sekadar menganggapnya sebagai beban sejarah yang tidak harus ia indahkan? Dan yang tak kalah penting, masih cukup luasakah kampus dan sistem pendidikan saat ini menyediakan ruang-ruang bagi mahasiswa

untuk mengaktualisasi diri, sesuai tuntutan perannya?

Di sini, penekanan atas pentingnya proses penggodokan mahasiswa tidak akan pernah lepas dari 'gugatan' tentang masih relevankah kuliah dengan hanya mengandalkan

diktat, literatur dan ceramah dosen serta kebanggaan mencapai Indeks Prestasi (IP) setinggi langit? Terlebih dalam konteks anak Sospol yang *notabene* mempelajari ilmu-ilmu sosial dan akan terjun dalam realitas sosial yang kompleks. Ini berarti

pula indikator keberhasilan seorang mahasiswa Sospol tidak bisa diukur secara kuantitatif semata dan semudah penilaian di fakultas-fakultas eksakta.

Sebesar apa tuntutan bagi mahasiswa

Sospol untuk beraktivitas di luar kelas, baik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ilmu yang ia pelajari maupun sebagai salah satu ruang dia untuk memperjuangkan idealisme, menunjukkan kepekaan dan kekritisannya terhadap realita disekitarnya? Atau dengan kalimat yang lebih gamblang, Kenapa 'sih mahasiswa -apalagi anak Sospol- harus menjadi aktivis?

Mahasiswa -tidak peduli latar belakang ilmu yang dipelajarinya- memiliki tuntutan yang sama untuk selalu peka dan kritis terhadap lingkungan sosialnya. Ia dituntut



untuk mencari pemahaman seluas-luasnya menyangkut disiplin ilmu yang ia geluti, terlebih lagi menyangkut fungsi dan peran dia sebagai bagian dari gerakan sosial serta relevansi perannya dalam transformasi sosial. Dan akan sangat sulit merealisasikan hal itu ketika ia hanya mengandalkan proses perkuliahan di kelas. Indeks prestasi sudah tidak lagi dianggap sebagai indikator kecerdasan, terlebih penentu keberhasilan mahasiswa.

Dengan kata lain, kegiatan akademis, dalam hal ini kuliah di kelas, tidak cukup memadai bagi mahasiswa untuk memenuhi tuntutan perannya sebagai kelompok intelektual yang memiliki idealisme dan kepekaan sosial yang tinggi. Di sinilah tuntutan menjadi seorang aktivis menemukan jawabnya. Dengan aktif di luar kelas, entah itu di UKM, BEM, Mapala, Persma, lembaga ekstra kampus, dsb, ia memperoleh ruang untuk memperjuangkan idealismenya sebagai mahasiswa sekaligus secara pragmatis ia mendapatkan kesempatan menyalurkan bakat minatnya serta mendapatkan pengalaman, yang mungkin saja akan sangat berguna baginya ketika lulus dan terjun ke masyarakat. Namun, terlepas dari apakah ia idealis atau pragmatis, tetap yang menjadi tekanan di sini adalah pentingnya mahasiswa untuk aktif di luar kelas.

"Akan sangat rugi ketika mahasiswa hanya melulu kuliah di kelas. Ia tidak akan mendapat apa-apa. Selain itu juga 'mengkhianati' tanggungjawabnya sebagai mahasiswa ketika ia nyaman dengan keapatisan dia terhadap realita sosial, politik di sekitarnya. Mana tanggungjawab moralnya sebagai mahasiswa?" ungkap seorang mahasiswa Sospol yang tidak mau disebutkan namanya ketika ditemui **SINTESA** di Tapal Kuda.

Tidak dapat dipungkiri, tuntutan untuk menjadi aktivis itu memang sejalan dengan kesadaran dan pemahaman mahasiswa atas peran dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari gerakan sosial. Inilah yang mendasari definisi dari kata 'aktivis' itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Arie Sujito, Dosen Sosiologi yang juga mantan Pemimpin Umum **SINTESA** dan aktivis DEMA (Dewan Mahasiswa),

"Aktivis mahasiswa lebih dimaknai sebagai mereka yang punya aktivitas di luar kegiatan perkuliahan rutin, memiliki tingkat kepedulian dan kepekaan terhadap realitas sosial dan politik".

Pandangan lebih spesifik diungkap oleh Hasrul Hanif, mantan Pemimpin Umum **SINTESA**, "Aktivis bisa saja tidak dibatasi hanya mereka yang bergerak dalam organisasi yang kental nuansa politisnya atau harus turun jalan (demonstrasi, red.) Selama mereka punya idealisme dan komitmen tinggi sebagai bagian dari social movement, di ruang mana pun bisa disebut aktivis. Teman-teman dari Persma yang mencoba kritis terhadap realitas sosial melalui tulisannya atau teman UKM Musik yang menyuarakan kepeduliannya atas realitas sosial melalui lirik lagunya pun bisa juga disebut aktivis. Bahkan ada beberapa Mapala yang melakukan advokasi terhadap masalah lingkungan dan masyarakat sekitarnya", jelasnya.

Pada dasarnya, aktivis di maknai ketika mereka menunjukkan idealisme dan komitmen tinggi atas tanggungjawab perannya sebagai mahasiswa, dengan melakukan kerja-kerja praksis sebagai wujud kepedulian, kekritisan dan kepekaan mereka terhadap realitas sosial. Di sinilah tuntutan untuk menjadi seorang aktivis bagi mahasiswa, terlebih anak Sospol, menemui relevansinya.

Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kampus sudah cukup leluasa menyediakan ruang-ruang itu? Mengingat sejak diberlakukannya Otonomi Kampus, UGM mengatur pembatasan masa studi mahasiswa hanya selama 7 tahun. Cukupkah waktu sepanjang 14 semester itu menjadi 'medan' penggodokan mahasiswa? Apakah ia dapat secara proporsional menempatkan dirinya sebagai mahasiswa yang memiliki tanggungjawab peran, relevansinya dengan transformasi sosial dan sekaligus memiliki tanggungjawab pribadi dalam merancang masa depannya? Di kalangan mahasiswa sendiri cukup lama beredar mitos bahwa mahasiswa aktivis itu kuliahnya *molor* dan cenderung 'melalaikan' kuliah (di kelas, red.).

"Mitos itu hanya apologi! Sifatnya kasuistik, tergantung pribadi yang bersangkutan, selama ia bisa bagi waktu saya

pikir nggak masalah, banyak juga 'kok aktivis yang kuliahnya cepat", ujar Adhi Setyo, mantan Ketua Senat Fisipol yang kini sedang menempuh Pasca Sarjana di Magister Manajemen UGM dengan beasiswa dari Sampoerna. "Pembatasan masa studi itu sebenarnya nggak masalah!" tambahna. Pendapat senada diungkap Ratna, IP '99, "Itu hanya apologi! Aktivitas di luar kelas justru mendukung proses kuliah di kelas", ujar mahasiswi yang aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini.

Arie Sujito berpendapat lain, "Mitos itu dipengaruhi oleh kondisi struktur pendidikan. Orang kuliah lama itu tidak dibangun asumsi bahwa mereka bodoh atau tidak peduli terhadap sekolah! Mereka adalah korban dari struktur pendidikan!", cetusnya. Ia menambahkan, "Sejujurnya, memang tidak ada keleluasaan ruang bagi mahasiswa dalam struktur pendidikan yang terlalu banyak memberi beban pada mahasiswa".

Pembatasan studi bagi anak Sospol memang dilematis, bahkan dengan alasan yang paling pragmatis sekalipun. Di satu sisi muncul semacam pengakuan bahwa aktivitas mahasiswa di luar kelas tersebut memang mendukung idealisme, keberhasilan dan memungkinkan mahasiswa tersebut mengembangkan berbagai keahlian yang akan berguna nantinya. Dalam Workshop JMPT (Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi) FISIPOL beberapa bulan yang lalu misalnya, muncul pengakuan dari pihak JMPT Universitas bahwa dalam dunia kerja, IPK hanya 30% menjadi pertimbangan dalam penerimaan tenaga kerja. Selebihnya, lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan lainnya yang tidak mungkin bisa didapatkan ketika ia masih menjadi mahasiswa yang hanya berkutat pada ruang kuliah. Dalam alasan yang idealis, pembatasan masa studi cenderung akan memaksa mahasiswa untuk menyelesaikan studi secepatnya yang kemungkinan besar mendorong mahasiswa ke arah pragmatisme dan menjadi apatis terhadap tanggungjawab perannya.

Namun di sisi lain desain pendidikan tinggi terutama pasca otonomi kampus memang cenderung membatasi masa studi sehingga memaksa kita untuk mensiasati dan

'berkompromi'. "Mahasiswa dalam kurun waktu itu masih bisa idealistis 'kok. Meski sebenarnya kalau mau realistis, 7 tahun bagi saya masih terlalu singkat", ujar Arie Sujito. "Lebih baik menumpuk (mahasiswa, red.) di dalam daripada menumpuk 'sampah' di luar!!" tegasnya.

Gugatan menyangkut kurang luasnya mahasiswa dalam beraktivitas di wilayah non akademis atau di luar kelas, salah satunya dengan adanya pembatasan masa studi, kabarnya cukup direspon oleh beberapa pihak di fakultas. Berkaitan dengan JMPT, sempat terlontar niatan dari fakultas untuk memasukkan kegiatan non akademis itu ke dalam penilaian, dengan menghargainya sebagai bagian dari kegiatan akademik melalui pemberian bobot sks.

"Itu dampaknya dua sisi, bisa positif atau negatif. Jangan-jangan hanya dijadikan apologi ketika ia memang nggak mampu di kuliahnya terus memaksimalkan diri di aktivitas luarnya itu!" komentar Adhi Setyo. Sedangkan menurut Arie Sujito, "Itu bagus, memberi penghargaan. Sebagai *stimulus* agar mahasiswa beraktivitas di luar perkuliahan rutin, menjadi aktivis. Tapi memang bisa jadi persoalan ketika 'menjadi aktivis' di sini lebih dimaknai sebagai suatu kewajiban, padahal idealnya 'menjadi aktivis' adalah suatu panggilan", ungkapnya.

Meski demikian, terlepas dari apakah aktivitas itu dinilai, diberi bobot sekian sks atau tidak, pada dasarnya itu tidak akan menyurutkan tuntutan bagi mahasiswa akan tanggungjawab perannya sebagai bagian dari gerakan sosial. Ia akan selalu dituntut untuk menyuarkan idealismenya, kekritisan dan kepekaannya terhadap realitas di sekitarnya, terlebih ketika kampus sendiri telah cukup beritikad baik memberikan keleluasaan ruang itu bagi mahasiswa untuk mengaktualisasi perannya itu.

Maka, tidak ada lagi alasan bagi mahasiswa untuk tetap 'nyaman' dengan kecuekannya terhadap tuntutan peran yang melekat pada statusnya itu. Menjadi mahasiswa jangan hanya jadi suatu kebanggaan semu. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sadar dan merealisasikan itu?

Rui

Aku



Sospol

Aku di Sospol berawal dari titik-titik. Titik-titik kosong berbentuk bundar yang dengan tekad yang bulat, ku isi dengan warna hitam dari guratan ujung potlot 2B yang senantiasa runcing. Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Jurusan.....

Aku tahu bila aku di Sospol dari lembaran surat kabar lokal yang terpampang di papan koran kelurahan. Di kota tempat aku saat ini ngekost, Yogyakarta. Ya....aku ingat malam itu. Berbekal sekotak korek api dan segunung harapan, aku berlari ke papan koran kelurahan. Beberapa menit setelah teman kostku bilang, "Hei....lulus nggak?" tanyanya. "Belum pengumuman!" jawabku pendek. "Udah.....dimuat di KR!!" sergahnya. Aku terkesiap. Lalu berpikir dimana aku dapat memperoleh KR pada malam ini. Cling. Muncul ide. Ke koran kelurahan, tekadku.

Jress.... batang korek pertama menyala menerangi lembaran KR di papan koran kelurahan yang tertutup kaca. Dengan tekun ku telusuri deretan angka 16 digit yang menjejali lembaran koran. "Ehhmmm.....ini dia", gumamku ketika menemukan kombinasi angka awal yang sama dengan nomer ujianku.

"Sedikit lagi...udah dekat....nah !!!...ini dia!!!" 202-44-04581 Bujang Lapuk 4482xxx.

Yeeeah....!! Desahku seraya menurunkan kedua sikut ke pinggang dengan kedua tangan tergeggam. Persis Mc Doohan yang baru saja memenangkan balap

memenuhi dadaku. Ingin rasanya meloncat-loncat sambil teriak-teriak. Tapi, di dekat koran kelurahan nongkrong beberapa AKAMSI (Anak Kampung Sini). Ah....nanti aku dianggap edan. Mendingan, santai aja jack!



Trus....

Langsung ke
W A R T E L .
Interlokal ke
rumah untuk

mengabarkan berita paling gres saat ini. "Hallo...papi, kirim aku duit!!" perintahku dengan gaya aristokrat. "Apa...kan baru saja di kirim?!!!" terdengar olehku suara sewot dari gagang telpon. "Aku kan el..lul..lus!!!!" kataku sembari mengangkat alis mata. Persis bujang lapuk yang sedang mengumbar rayuan gombal. "Bujang lapuk lulus...!!" suara yang bernada tinggi terdengar dari gagang telpon. "Yeah...!!" suara girang lebih dari 4 orang menyusul turut bersorak-sorai. Entah mereka bergaya *a la* Mc Doohan atau tidak. Yang jelas, virus keriangen telah merambat melalui kawat telpon.

"Mahasiswa", gumamku lirik. 'Mahasiswa' sekali lagi aku bergumam dan mulai melamun. Lalu, beragam sosok identitas mahasiswa berseliweran di benakku dan mulailah lamunan panjangku. Mahasiswa itu keren.....mahasiswa itu bebas.....gondrong.....pinter ngomong....suka demo. Mahasiswawi.....apa ya? Wah, mesti banyak kenalan baru nanti....jadi tambah semangat 'nih!! Mahasiswa Sospol. Wah..mesti pinter ngomong 'nih. Sospol UGM lagi. Mesti jago diskusi, mesti kritis, pokok'e pasti tokcer!!!!

Sambil terus melamun, waktu terus berlanjut.



motor 500 cc. Bak ledakan mercon di malam tahun baru, keriangen meletup-letup

Oh...gini tho yang namanya kuliah!! Ada dosen, ada SKS. Yaaa..kayak guru dan mata pelajaran. Nilai lebih apa yang bisa ku dapat dari kesempatanku mengecap bangku kuliah dan status mahasiswa? Bergaul, cari teman, cari pengalaman, ikut kegiatan. Ya..itu dia!! 'ikut kegiatan untuk mencari teman dan pengalaman sebanyak-banyaknya!!

Mahasiswa aktivis. Apaan tuh? Kedengarannya menarik. Ikutan aa...h. Mulailah aku kenal dengan diskusi. Menganalisa kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi dll. Ooh..ternyata selama ini masyarakat dibohongi oleh penguasa. Jadi, penguasa yang lalim harus dikritisi dan dilawan. Pengetahuan baru mulai menjejali otakku. "Mahasiswa harus kritis!! Apalagi mahasiswa sospol. Mesti mengerti dan peka terhadap kondisi masyarakat sekitar", ujar seorang kawan yang membimbingku. Seperti yang ditulis Goenawan Mohamad : 'Ketidakadilan memang bisa dibaca tanpa huruf'

Demo. Semenjak SMP hingga SMA, citra yang paling kuat melekat di benakku mengenai mahasiswa ialah KRITIS DAN SUKA DEMO. Pokoknya heroik 'deh. Ternyata, mahasiswa yang suka demo dan kritis itu bermacam-macam. Katanya, ada yang kiri dan ada yang kanan. Waaahh..apa 'tuh yang kiri sama yang kanan. Belum ngerti 'nih. Maklum anak baru. Mulai belajar. Kiri itu

bla...bla...bla. Kanan itu was...wes...wos.

Itukah mahasiswa aktivis? Oh....tidak. Label mahasiswa aktivis memang lebih cenderung dimaknai atau dekat dengan aktivitas aksi protes atau pun demo. Namun, tidak sesempit itu. Mahasiswa aktivis adaal...laaah, predikat yang disandang oleh mahasiswa yang terlibat aktif dan militan dalam wadah kegiatan selain kuliah 'thok! Tapi ini definisi penulis. Saudara-saudara pembaca bebas dan berhak membuat definisi sendiri. Aktivitas di dunia kampus amat beragam. Mulai dari yang berbau akademis seperti kelompok diskusi, sampai yang berbau sorga. Pokoknya banyak 'deh.

Banyak hal yang aku dapatkan dari ikut aktif dalam organisasi mahasiswa. Dapat banyak teman, punya tempat nongkrong, bisa *sharing* dan curhat. Percaya deh, masa-masa menjadi mahasiswa merupakan masa yang sangat berharga untuk belajar menjadi dewasa, belajar memecahkan masalah dan belajar untuk tegar dalam menghadapi hidup. Memang bukan cuma masa kuliah. Sebelum dan sesudah kuliah juga masa belajar untuk hidup.

Namun, saat ini aku di Sospol. Apa yang dapat aku lakukan? Apa yang akan ku pilih? Aku di Sospol bermula dari titik-titik kosong yang akan ku isi dengan warna sesukaku. Warna pilihanku. Apa yang terbaik buatku. AKU.

Gali



LEMBAH FITNESS CENTRE

MEGAH-FANTASTIS-NYAMAN-TERBESAR-TARIF BISNIS

Fasilitas meliputi:

1. Ruang dan peralatan fitness lengkap
2. Jogging Track
3. Lingkungan indah
4. Pusat Olahraga Rekreasi
5. Parkir Luas

Biaya pendaftaran: Rp. 25.000,00

Program latihan

1. Pembentukan fisik atlet
2. Privat atlet Umum
3. Penambahan berat Badan
4. Penurunan Berat Badan
5. Pembentukan /Body Building
6. Rehabilitasi Pasca Cidera
7. Kebugaran

Biaya latihan perbulan

Fitness:

Umum: Rp 30.000,00
Mahasiswa: Rp 25.000,00
Privat Klp.: Rp 50.000,00
Privat Ind.: Rp 60.000,00

Alamat: Tennis Indoor Lembah UGM Telp. (0274)512979

Tubuh dan Kuasa dalam Gelak Kapitalisme Mutakhir

Pisau bedah Foucault mengenai kuasa, mengoyak dan bahkan menyungsang konsepsi arkaik yang lazimnya menerangkan kuasa sebagai kapabilitas subjek untuk mempengaruhi orang lain, koersif, berkarakter kekerasan, atau artefak material yang digunakan kelas borjuis penindas untuk menghegemoni dan mensubordinasi kelas proletar- tertindas.

Kuasa, demikian Foucault, harus dipahami pertama-tama banyak dan beragamnya hubungan-hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya. Kuasa tak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur legitimasi, tidak represif tapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.

Dengan demikian, dalam kaca pandang Foucault, kuasa- yang melekat pada hasrat mengetahui- tak bisa diceraikan dari pengetahuan; sepanjang trajektori historisnya kuasa dan pengetahuan senantiasa berselingkuh, memadu, menyatukan. Kuasa hadir dimana-mana {omnipresent}. Ia berarak dari mulai ruang sidang, ranjang sampai ke altar pemujaan. Maka tubuh sebagai entitas transisional melalui apa individu melakukan relasi dengan kesemestaan, tak pelak lagi, menjadi lokus tempat kuasa dan pengetahuan hadir, dan bermain.

Seraut narasi dari film *Europa, europa*, yang mana ceritanya dinukil dari pengalaman nyata semasa NAZI berkuasa menjadi amsal bagaimana kuasa dan pengetahuan membidiik menukik hingga ke sepetak areal paling privat, yaitu sesuatu yang *inherent* dalam subjek dan

terberi dengan sendirinya., tubuh. Di film ini diceritakan seorang bocah Yahudi yang hidup sebagai anak angkat di sebuah keluarga Jerman, ia menyembunyikan identitasnya karena di sanalah nubuat nasibnya tersurat: alat kelamin yang disunat. Beruntung, tebing cerita dipungkas dengan sesuatu yang melegakan yang dilatari dengan rontoknya Jerman: si bocah akhirnya dapat kencing dengan leluasa terbuka di depan orang lain. Betapa sebuah episode yang mencekam : status pahlawan dan penjahat, baik dan buruk, hingga ikhwal hidup dan kematian anak manusia, ditentukan oleh kategori batang zakarnya!

Hamparan eksposisi ini akan coba mendiagnosa tipologi kuasa dan pengaruhnya pada tubuh disetiap buhul persilangan dan pelataran-pelataran penting yang bercokol di era kapitalisme mutakhir. Seturut pencandraan Daniel Bell, masyarakat kontemporer adalah satu amalgamasi yang pelik dari tiga bidang atau wilayah terpisah : struktur sosial (*techno economic*), politik (*policy*), budaya (*culture*).

Pertama, wilayah ekonomi. Prinsip axial (poros) yang beroperasi dalam zone techno economic adalah rasionalitas fungsional yang dicirikan dengan pengekonomisan (*economizing*) pelbagai bidang kehidupan. Karakter asali wilayah ini adalah efisiensi, pengurangan biaya, birokratis, hierarkis. Dalam zone ini norma-norma (*wertrationalitat*) tidak dihiraukan, sehingga cenderung terjadi reifikasi (pembendaan) atas manusia, sebab kemanusiaannya direduksi menjadi hanya sekedar peran-peran yang musti dilakoni berlandas atas aturan impersonal yang telah distandarisasi. Tak heran, tubuh dalam wilayah ini menjadi entitas yang musti runduk dalam kekauan kuasa rasio teknologis.

Buku Ritzer, *Mcdonaldization of society* memaparkan secara amat memukau berjingkrangnya kuasa rasio instrumental ke



setiap relung kehidupan. McDonaldisasi menyergap dan menguntit manusia bahkan sejak sebelum lahir (dalam rahim) hingga setelah kematian. Segala sesuatu di kurun ini didesain agar dapat merengkuh kapital sebesar-besarnya. Bahkan generasi zaman ini telah berhasil menciptakan metode kematian yang baru, seperti didedah sosiolog Nuland : "Pada generasi sekarang, kita telah menambahkan sesuatu yang baru; kita telah menciptakan metode kematian modern. Kematian modern terjadi di rumah sakit modern, dimana dia bisa disembunyikan, dibersihkan kuman-kuman organiknya, dan akhirnya dipaket untuk pemakaman modern".

Kedua, wilayah budaya, merupakan sepetak wilayah melalui apa konfigurasi simbol-simbol mengemuka, hadir dan bermain. Simbol-simbol itu membiaskan ekspresi yang merupakan resultan dari jawaban-jawaban tentatif mengenai keperihan eksistensial (*existensial predicament*) yang menderanya. Budaya modern, demikian Bell, adalah penolakan terhadap segala tapal batas dan jeratan pengalaman. *Mutatis mutandis*, prinsip tersebut berarti membebaskan elemen-elemen demonik untuk dieksploitasi dan lantas diekhsibisikan dengan leluasa.

Koran, televisi, komputer adalah lokus-lokus melalui apa pelbagai simbol dan citra-citra diperagakan dan dipentaskan. Tubuh dalam jala-jala hiper-realitas media massa nampak sebagai entitas yang ambigu: di satu sisi ia tampak bebas, riang, ramah, memikat, menggiurkan. Di sisi lain ternyata ia tetap terkurung dalam dan menjadi instrumen bagi akumulasi kapital. Para *Cyber Religionist* menganggap bahwa dalam era cyber akan terjadi, meminjam istilah Daniel Bell, apa yang dinamakan *democratization of genius*.

Rheingold dengan nada optimis mengatakan, "Di dalam dunia global yang nantinya akan dihuni oleh sepuluh milyaran manusia, demikian barangkali *cyberspace* adalah sebuah tempat yang lebih baik untuk membuat setiap orang bahagia, disetiap waktu". Bersitan optimisme tersebut nampaknya hanya menyorot satu wajah saja dari wajah ganda media, yang seperti dewa Janus: satu wajah mempesona, menawarkan preferensi citra dan identitas, satu wajah lagi

menyeramkan karena karakternya yang mencabik realitas, menjebol tanggul moral, dan mengimplosi massa untuk lantas secara telak dicecerkan dalam keadaan amnesia, lupa akan ada.

Dalam dunia cyber, tubuh dijelajahi, dieksploitasi melampaui yang dapat dibayangkan (*Beyond imagination*). Bahkan ruang simulakra menyediakan wahana buat berhubungan seks tanpa mutasi badani-*teledildonik*. Dengan demikian, pupuslah dimensi misteri auratik tubuh. Segalanya kini serba transparan, bebas dilihat, diraba, di mainkan....

Daniel Bell, dengan wajah merengut, mentahbiskan bahwa kita memasuki kurun *Psicedellic Bazar*, bazar birahi. Bell meratapi tercabik-cabiknya etika protestan sebagai semesta nilai-nilai yang dianggapkan telah melangitkan peradaban *bourguise* barat. Kosmologi rasional tengah retak berkeping, segalanya sekarang musti sensual, memikat, membujuk, agar menggelinjangkan gairah konsumen.

Sosiolog genit, Jean Baudrillard menekankan arti bujukan sebagai kuasa subtil yang memberondong saraf-saraf kesadaran dan alih-alih represif, kuasa bujukan malah memukau, membetot, membelit dan menyedot individu-individu ke dalam hiruk pikuk massa dan lantas berdesakan dalam kumparan lubang hitam media. Massa, tutur Baudrillard, menyerap seluruh energi sosial namun tidak lagi membiaskannya. Ia menyerap setiap tanda dan setiap arti, namun tidak lagi mencerminkan mereka. Ia menyerang setiap pesan dan mencerna mereka untuk setiap pertanyaan yang diberikan, ia mengirimkan satu jawaban yang merupakan pengulangan yang tidak memperjelas dan memutar. Dititik ini lenyaplah subjektivitas, yang ada hanyalah mayoritas yang membisu dan menari dalam ritual permainan penanda dan citra-citra yang silang menyilang, simpang siur, tumpangtindih, datang dan pergi dalam kecepatan tak terperikan.

Ketiga, wilayah politik. Merupakan wilayah dalam mana persamaan dan legitimasi menjadi prinsip *axial*nya. Bangkrutnya proyek-proyek modernitas menyebabkan meriapnya pelbagai interogasi terhadap keabsahan

universalitas nalar dan universalitas ego individual sebagai intisari spirit modernitas yang disangkakan akan sanggup mengkreasi sebuah jagat raya maju beradab.

Jean Francois Lyotard berujar bahwa adalah suatu kemustahilan untuk membangun sebuah wacana universalitas nalar. Dunia manusia itu, lanjutnya, dibangun dari kesederhanaan-kesederhanaan yang dinamai bukannya digambarkan. Kesederhanaan itu merupakan kompleks bangunan "pra logis".

Dalam aras politik, perubahan yang terjadi sebagai rembesan dari diadilinya modernitas terasa cukup signifikan. Tumbangnya keyakinan adanya sebuah *sum-mum bonum* (kepercayaan tertinggi) yang diimani melekat dalam suatu metanarasi, semisal nasionalisme, menyebabkan memekarnya semacam *willful nostalgis* yang kembali menggeliatkan *language game* yang pusparagam, yang sebelumnya diringkus telan oleh *the truth rezim* (rezim kebenaran). Biopolitik, politik identitas, politik diferensi adalah nomenklatur yang relatif cukup baru dalam ilmu politik, yang spirit dasarnya adalah keramahan kognitif untuk menghormati pelbagai perbedaan yang melekat dalam individu-individu sebagai entitas yang unik, yang mempunyai *universum* kebermaknaan yang unik pula, sebagai akibat dari ruang hidup (*Lebenswelt*) yang berlainan.

Agnes Heller mengartikan biopolitik sebagai konsep dari gerakan-gerakan yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*Different*). Dengan demikian, konsep tubuh lantas tereskalasi tidak saja yang secara langsung membidik tubuh, melainkan segala kritisisme yang *inherent* dalam dan mengkontruksi individu serta pelbagai negasi oposisional yang berada di tepian *the truth regime*. Dalam hal ini gerakan feminisme, anti rasisme, environmentalisme dan fundamentalisme bisa dimasukkan kedalam kontestasi pumpunan wacana politik identitas.

Sepanjang bentang tulisan ini tercandra bagaimana kuasa berjingkrang, meliuk-liuk ke setiap ceruk kehidupan. Kuasa bukanlah sesuatu nan jauh, melainkan segala apa yang memedar memusar dalam hidup kita sehari-hari dan bahkan membias dan bahkan terseruak dari dan dalam laku kita. Sebab,



salah satu syahwat kuasa adalah individualisasi; pengaransemenanan subjek menjadi sosok yang mengacu pada standarisasi. Tak pelak, tubuh pun menjadi areal melalui apa kuasa menebarkan jaringan-jaringnya. Maka sejarah tubuh adalah juga sejarah orde. Tatkala tubuh diperhadapkan dengan sesuatu di luarnya, di sanalah sejarahnya bermula. Dan pengetahuan yang telah bersunting dengan kuasa pun lantas mengklasifikasi, membedakan dan kemudian memberi tera : tubuh sehat dan tubuh sakit, tubuh ningrat dan tubuh budak, tubuh pahlawan dan tubuh kriminal.

Tapi ada tubuh-tubuh yang patuh dan lantas terbenam sekadar menjadi subjek hasil -memungut parafrase dari foucault- *a figment of discourse*, omong kosong diskursus. Dan ada tubuh-tubuh yang melawan dan bersikukuh memahat sejarahnya sendiri. *Aku memberontak, maka itu kita ada !!!*

Tia Setiadi

Sambungan dari hal. 6

Atik, mahasiswa AN '00 melihat ini sebagai ketidaksiapan rektorat. Temannya, mahasiswa PBUD '02 dari luar Jawa kelabakan waktu registrasi. "Awalnya, di surat penerimaan mahasiswa baru nggak tertulis anggaran BOP. Yang ada SPP, askes, inisiasi (Masa Kenal Kampus, red.), jaket, dan lainnya. Lalu, pas registrasi ditarik BOP-nya", katanya.

Menanggapi hal tersebut, Goedono menyatakan, "Dalam waktu yang agak singkat (jarak antara keluarnya SK Rektor tentang pemberlakuan BOP dengan waktu registrasi, red.) itu repot sekali (sosialisasinya, red.), lalu kita berikan aja di loket". Padahal menurutnya, sebelum maba diterima, sebenarnya sudah ada pemberitahuan pada waktu pengambilan formulir daftar ulang. "Cuma saya tidak tahu pelaksanaan di lapangan seperti apa, ini diluar kewenangan saya", tambah Goedono berkilah.

Eksposisi diatas menunjukkan bahwa selain permasalahan pengelolaan BOP yang kurang transparan dan sosialisasinya yang minim, *policy making* BOP itu sendiri banyak menimbulkan kontroversi dan reaksi dari mahasiswa sebagai objek yang terpaksa harus menanggung semua itu.

Aviet, Evit

(Lap. Eva, Diah, Bambang, Nanang, MM, Lia)

Sambungan dari hal. 11

Hanya saja kesiapan dan kualitas dosen tidak akan berpengaruh apa-apa selama rasio jumlah dosen dan mahasiswanya tidak seimbang seperti di Fisipol ini. Seperti yang diutarakan oleh Drs. Djoko Suseno, SU, Ketua Jurusan Sosiatri, "Jumlah dosen di Fisipol ini masih sangat minim. Idealnya rasio dosen-mahasiswa itu 1:25". Ketika ditanya hal yang sama, Wakil Dekan Akademik, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, mengatakan, "Jatah dosen di fakultas itu otoritas universitas. Dan kenyataannya jumlah dosen di Fisipol memang tidak seimbang dibandingkan jumlah mahasiswanya".

Berbagai hal diatas cukup menjadi bukti bahwa sebenarnya universitas sendiri tidak cukup memiliki kesiapan ketika mencanangkan JMPT. Sebab kompetensi lulusan yang diharapkan seharusnya didukung oleh keseimbangan antara proses perkuliahan dan fasilitas pendukungnya. Dan tak kalah penting juga lingkungan sosialnya. Tapi pada kenyataannya hal ini belum terpenuhi.

Aviet

Keluarga Besar SINTESA turut berbelasungkawa atas meninggalnya
Ayahanda dari
Nanang Ery Sujarwo Chalid
Mantan Redpel Politik SINTESA

politik filsafat sastra
agama
diskon 25% sampai 50%
book store and distributor
Jl. Gajayon muncung no.7 (pertigaan gg guru) Bagja ☎ 377500
+gratis bookmarks

new java[®]

café & restaurant

**LIVE MUSIC
EVERY DAY**

Tequila de Vino
band

M i n g g u

Kilimanjaro
band

Selasa & Jumat

FLASH
BAND

K a m i s

Profile
BAND

Rabu & Sabtu

FACE
BAND

Senin & Sabtu

is the Place

for all your events

- DINNER GATHERING
- COFFEE BREAK
- PRODUCT LAUNCHING
- BIRTHDAY PARTY
- MUSIC CONCERT, ETC

Open Daily :

17.00 - 01.00

UNTUK RESERVASI :

NEW JAVA CAFE & RESTAURANT

Jl. Magelang Km. 5,7 YOGYAKARTA

Telp. 0274-563356 FAX. 0274-563830

BAWA IKLANINI SEBAGAI BUKTI TICKET MASUK GRATIS

new java[®]
café & restaurant

Jl. Magelang Km. 5,7 Yogyakarta
Telp. (0274) 563356 Fax. (0274) 563830

FREE PASS

- Bebas masuk New Java Café dan berlaku untuk 1 orang
- Hanya untuk regular program dan tidak berlaku untuk spesial event
- Tidak dapat ditukarkan/diuangkan
- Berlaku s.d. Tgl 8 Oktober 2007

Full of action

DISCOUNT

20%
F&B

OgotPhone

Jogja Celullar Shop

**HP Baru Murah...!
KHUSUS TUKAR TAMBAH
BERANI BELI TINGGI..!
HP + KARTU GSM
HARGA GROSIR...!!!
VOUCHER + ASSESORIES**

Jl. Prof. Yohanes 74 (Utara Galeria)

Jl. Mataram 55B (Timur Mal Malioboro)

Telp. 546558 / 081 2272 0172